

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini didasari oleh peneliti yang melihat fenomena kelompok transgender yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat di kota Medan, yang dimana dalam kehidupan sehari-harinya kelompok transgender sering memperoleh perlakuan tidak adil dari masyarakat, dan mengalami kesulitan dalam bidang administrasi jika sudah berurusan dengan pemerintah. Disamping itu juga kelompok transgender sering di diskriminasi. Diskriminasi tersebut muncul akibat ketidakpahaman, ketakutan, dan prasangka negatif dari masyarakat.

Komunitas transgender mulai bermunculan di kota-kota besar, munculnya komunitas tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan yang semakin kompleks dan kelompok transgender yang membutuhkan dukungan dari sesama. Di Kota Medan sendiri ada beberapa komunitas transgender, salah satunya adalah *Cangkang Queer*, komunitas inilah yang menjadi fokus penelitian ini. *Cangkang Queer* merupakan sebuah organisasi yang aktif dalam menyampaikan isu-isu *Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression (SOGIE)*, dan HAM LGBT di Medan, dan dari komunitas inilah nantinya dieksplorasi pengalaman kehidupan yang dijalani oleh kelompok transgender.

Kota Medan adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia yang sampai saat ini mengalami pertumbuhan pesat, dan termasuk kota terbesar ketiga di Indonesia yang penyimpangan sosialnya cukup tinggi. Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di kota Medan yaitu fenomena kelompok

transgender. Berdasarkan data KPA (Komisi Penganggulangan AIDS) bahwa jumlah keseluruhan waria di kota Medan ada sebanyak 664 orang. Meskipun kelompok transgender dalam masyarakat belum dapat di terima oleh masyarakat umum, namun saat ini transgender di Indonesia sudah mulai berani mengungkapkan identitas dirinya di hadapan publik, beberapa dari mereka berasal dari kalangan para artis, misalnya Dinda Syarif yang dikenal sebagai modeling, Lucinta Luna yang merupakan selebriti, Dena Rachman yang merupakan penyanyi, model. Namun bukan berarti transgender di Indonesia memperoleh pengakuan dan dihargai oleh masyarakat umum.

Dinamika kehidupan kelompok transgender tidak terlepas dari cara mereka untuk menghidupi kesehariannya. Berbagai hal dikerjakan oleh transgender, ada yang membuka salon, usaha kecil-kecilan (berjualan cemilan keliling), bahkan ada yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Dari usaha dan pekerjaan yang digeluti oleh transgender tersebut tentunya belum mampu untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu kelompok transgender memilih untuk bergabung dengan komunitas yang ada untuk mampu bertahan hidup, berbagi permasalahan hidup, memperjuangkan hak-haknya, dan membangun solidaritas. Dalam komunitas mereka akan merasa lebih nyaman dan mendapatkan dukungan maupun dorongan hidup dari sesama.

Komunitas *Cangkang Queer* merupakan salah satu komunitas yang menjadi wadah bagi kelompok transgender yang berdomisili di kota Medan. Dalam komunitas ini, kelompok transgender memiliki keberanian diri untuk terbuka dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. *Cangkang Queer* terbentuk pada 10

Februari 2012 yang diinisiasi oleh 6 orang individu LGBTIQ yang sebagian besar anggotanya merupakan pekerja dan mahasiswa. Komunitas *Cangkang Queer* mendorong adanya pengakuan, penerimaan hak-hak individu dan komunitas yang memiliki orientasi seksual, aktif dalam kegiatan seminar dan diskusi tentang Pendidikan SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression*) serta aktif dalam media sosial untuk mengkampanyekan tentang LGBTIQ. Awalnya *Cangkang Queer* berfokus pada gerakan penelitian, dan kajian di kampus, kemudian pada tahun-tahun berikutnya berafiliasi dengan gerakan feminis sosialis dengan wilayah kerja di kampus dengan mahasiswa dan anak muda yang pro demokrasi, mengorganisir individu dan komunitas LGBTIQ. Pada tahun 2014 *Cangkang Queer* menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) Federasi Arus Pelangi. Saat ini sebanyak 6 kabupaten di Sumatera Utara telah dinorganisir oleh *Cangkang Queer*, yaitu Medan, Binjai, Deli Serdang, Siantar, Asahan dan Tanjung Balai.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki kedudukan dan peranan sosial masing-masing sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Laki-laki menjalani peran diri sebagaimana mestinya laki-laki, begitu juga sebaliknya perempuan menjalani statusnya seturut dengan definisi yang terkandung dalam tatanan sosial masyarakat dimaksud. Namun dalam realita kehidupan muncul fenomena yang menerabas tatanan sosial masyarakat, yaitu fenomena kelompok transgender. Fenomena kelompok transgender ini menjadi suatu anomali (ketidaknormalan, keganjilan, penyimpangan dari keadaan biasa).

Secara individual antara lain, lahirnya perilaku transgender tidak lepas dari suatu proses dan dorongan dalam dirinya, bahwa fisiknya tidak sesuai dengan

kondisi psikisnya, hal inilah yang menimbulkan konflik psikologis dalam dirinya. Permasalahannya tidak hanya menyangkut moral tetapi juga perilaku yang dianggap tidak wajar, namun merupakan dorongan seksual yang sudah menetap dan memerlukan penyaluran. Sehingga muncul berbagai reaksi dari masyarakat seperti, pandangan negatif, diskriminasi, stigmatisasi, marginalisasi, dan perundungan sosial. Maka dalam kehidupannya sehari-hari kelompok transgender mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang stabil dan kepercayaan dari masyarakat, memperoleh akses jaminan kesehatan, melanjutkan pendidikan, pelayanan publik yang berkualitas, dan partisipasi politiknya jarang diterima.

Transgender seringkali mendapat perlakuan buruk dari masyarakat dan didiskriminasi di bidang kesehatan (pelecehan verbal terhadap transgender, pencabutan kartu identitas diri sehingga kesulitan dalam mengakses layanan publik, dan sering dipersulit dalam administrasi). Oleh sebab itu mayoritas transgender masih harus memperjuangkan jati dirinya, terutama dalam mengakses jaminan kesehatan yang berkualitas dan tidak berbelit-belit.

Dari paparan diatas terlihat jelas bahwa kelompok transgender termasuk kategori yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan sering di diskriminasi dalam mengakses layanan publik yang berkualitas dan tidak berbelit-belit. Namun hal ini tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat, dan kultur yang ada di tengah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengeksplorasi **“Analisis Diskriminasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Kelompok Transgender (Studi Kasus Komunitas *Cangkang Queer*)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk diskriminasi pelaksanaan pelayanan publik kepada kelompok transgender?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum tujuan utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi yang diperoleh kelompok transgender di pelayanan publik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang dilema kehidupan transgender yang berdomisili di Sumatra Utara (kota Medan), serta bermanfaat bagi mahasiswa yang memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang transgender.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam melihat bingkai kehidupan transgender yang berada di

kota Medan, sehingga tidak terjadi diskriminasi pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, serta mengubah mindset ataupun persepsi, stigma negatif terhadap kelompok transgender.

c. Bagi Kelompok Transgender

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh transgender yang berada di Indonesia sehingga memiliki keberanian diri dalam menyuarakan advokasi dan hak-hak nya dalam kehidupan sehari-hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Pengertian Diskriminasi**

Diskriminasi merupakan suatu tindakan, sikap, dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok terhadap orang lain maupun golongan lain yang berada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Diskriminasi biasanya dilakukan oleh golongan atau kelompok yang populasinya lebih besar kepada kelompok minoritas, misalnya kelompok transgender yang sering mendapatkan diskriminasi dari masyarakat bahkan dari pemerintah. Diskriminasi nyaris ada dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, dan kerap kali kita tidak menyadari perlakuan tersebut terhadap orang lain.

Theodorson & Theodorson menyatakan bahwa diskriminasi merupakan suatu perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok berdasarkan sesuatu yang dianggap tidak layak, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, suku bangsa, agama dan kelompok minoritas lain yang muncul di dalam masyarakat (Fulthoni, 2009).

Diskriminasi sering diawali dengan adanya prasangka buruk dan negatif terhadap seseorang atau kelompok, dengan prasangka maka muncul perbedaan. Sehingga seiring berjalannya waktu dalam kehidupan sehari-hari kita menyebut “kita” dan “mereka”. Prasangka semakin diperparah oleh munculnya stigma kepada mereka yang dianggap berbeda. Diskriminasi merupakan perilaku yang bertujuan untuk mencegah suatu kelompok untuk memiliki sumber daya maupun kedudukan dalam lingkungan sosial.

Diskriminasi dapat dilihat di lingkungan sosial, dan paling sering di jumpai di kota-kota besar, misalnya adalah diskriminasi oleh masyarakat terhadap

kelompok minoritas yaitu kelompok transgender. Kelompok ini kerap dipandang buruk dan negatif karena dianggap menyimpang dari tatanan sosial dan bertentangan dengan agama dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Selain di lingkungan, kelompok transgender juga mendapatkan diskriminasi dari pihak pemerintah yaitu mereka sulit untuk memperoleh berbagai bentuk layanan publik.

## **1.2 Jenis-jenis Diskriminasi**

Adapun jenis-jenis diskriminasi yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut;

1. Diskriminasi rasial, yaitu diskriminasi yang berdasarkan ras, suku, dan warna kulit.
2. Diskriminasi gender, yaitu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin
3. Diskriminasi ageisme atau usia, yaitu diskriminasi dilihat dari umur seseorang, dan tanpa disadari hal ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari
4. Diskriminasi agama, diskriminasi yang terjadi berdasarkan kepercayaan seseorang
5. Diskriminasi Orientasi seksual, yaitu diskriminasi terhadap orang atau kelompok yang orientasi seksualnya berbeda. Diskriminasi ini kerap dialami oleh transgender, lesbian, gay.
6. Diskriminasi ekonomi, diskriminasi terhadap individu berdasarkan status ekonominya
7. Diskriminasi disabilitas, merupakan diskriminasi terhadap individu yang memiliki keterbatasan fisik dan mental
8. Diskriminasi pendidikan, diskriminasi yang terjadi ketika individu tidak memiliki Pendidikan yang tinggi.

## **1.3 Dampak Terjadinya Diskriminasi**

Diskriminasi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap individu maupun terhadap kelompok yang terdiskriminasi. Berikut ini merupakan beberapa dampak yang dirasakan dan dialami oleh individu yang terdiskriminasi, yaitu sebagai berikut;

1. Merasa malu dan minder jika bersosialisasi dengan lingkungan nya

2. Penghambatan akses terhadap berbagai kesempatan dan sulit memperoleh kepercayaan dari masyarakat umum
3. Penurunan kesejahteraan atau kesehatan psikologis dan emosional
4. Selalu merasa terintimidasi di lingkungannya
5. Dapat memicu orang lain yang melihat untuk melakukannya di masa depan.
6. Terjadi isolasi sosial, yang dimana individu atau kelompok yang terdiskriminasi tidak lagi memiliki kebebasan dalam kesehariannya.

#### **1.4 Bentuk Diskriminasi yang Dihadapi Oleh Kelompok Transgender**

Beberapa bentuk diskriminasi yang sering dihadapi atau dialami oleh kelompok transgender, yaitu sebagai berikut;

1. Diskriminasi dalam bentuk layanan kesehatan, transgender yang diperlakukan berbeda dengan pasien atau masyarakat oleh petugas kesehatan
2. Diskriminasi pekerjaan, kelompok transgender selalu kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, dan sulit untuk memperoleh pangkat atau jabatan, dan kadang mereka di pecat tanpa alasan.
3. Kekerasan dan pelecehan, kelompok transgender juga dapat mengalami kekerasan fisik dari masyarakat, verbal, dan psikologisnya.
4. Penolakan atau diskriminasi dalam keluarga, rata-rata orang transgender akan sulit di terima oleh keluarganya sendiri, dan bahkan di usir dan tidak menganggapnya sebagai anggota keluarga.

#### **1.5 Hak Asasi Manusia**

Menurut Sutardihm, 2007, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seorang manusia dan bersifat kodrati atau secara alami dimiliki oleh manusia sebagai suatu anugrah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hal ini sejalan dengan hakekat HAM yang difungsikan sebagai upaya dalam menjaga eksistensi manusia secara utuh di dunia ini. Begitu pula upaya dalam menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM

merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah maupun masyarakat. (Ardiansyah, 2021). Secara objektif prinsip dan pelaksanaan terhadap HAM memiliki persamaan di setiap negara, namun secara subyektif pelaksanaan HAM dapat berbeda karena perbedaan persepsi suatu negara (Putra, 2018).

Indonesia merupakan negara yang heterogen. Di satu sisi terdapat kelompok minoritas yang kehadirannya tidak diakui dan tidak dipandang serta sering mendapat perlakuan buruk, yang tidak sesuai dengan penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelompok tersebut merupakan pelaku transgender yang mengubah status kelaminnya karena menganggap orientasi seksualnya berbeda. Namun jika ditelusuri kembali terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 71 bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti bahwa seluruh masyarakat di Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (termasuk kelompok transgender), sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia maka perlu penegakan terhadap HAM sebagaimana mestinya.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia di Indonesia mendapatkan jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Sehingga dalam melakukan sebuah hak kita harus memperhatikan hak-hak orang lain juga agar hak yang kita jalankan tidak berbenturan dengan hak dan kepentingan orang lain (Samsu, 2018). Begitu pula dengan kelompok minoritas atau transgender di dalam perspektif Hak Asasi Manusia berada pada tingkat yang setara dengan kelompok mayoritas pemangku hak yang lain.

## **1.6 Pengertian Gender**

Gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas dan sosial budaya. Secara seksual laki-laki dan perempuan berbeda tetapi

peranannya di lingkungan sosial dapat disejajarkan. Gender sering dianggap sebagai suatu konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, kebiasaan. Menurut World Health Organization (WHO), gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan dapat berubah seiring berjalannya waktu.

Menurut Mansour Fakih, 1997 Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, misalnya bahwa perempuan dianggap bersifat lemah lembut, penyayang, pengertian, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap bersifat kuat, emosional, rasional, dan tangguh. Ciri dan sifat tersebut dapat dipertukarkan atau laki-laki bisa saja memiliki sifat seperti perempuan dan sebaliknya (Fakih, Analisis Sosial dan Transformasi Sosial, 2008).

Dalam konsep gender terdapat poin utama yaitu, identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender merupakan cara pandang seseorang melihat dirinya, baik sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Sedangkan ekspresi gender adalah bagaimana seseorang mengekspresikan gendernya (manifestasi) melalui cara berpakaian, gaya rambut, gaya berbicara, pergaulan hidup dan berperilaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan dan laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan antara perbedaan laki-laki dan perempuan termasuk kreasi sosial kedudukan laki-laki yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan derajat perempuan.

Berikut beberapa ungkapan terkait konsep gender, agar lebih mudah untuk dipahami:

1. Gender merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Laki-laki dan perempuan sesuai dengan peranan dan fungsinya di dalam keluarga, sosial juga ditambahkan bahwa gender adalah perbedaan status antara laki-laki dan perempuan (Depnakertrans).
3. Penerapan dan keadilan gender
4. Kemitrasejajaran pria dan wanita untuk ikut serta dalam setiap aspek pembangunan.
5. Persamaan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, persamaan status sosial dalam kesempatan kerja dengan memperhatikan perbedaan kodrat perempuan seperti hamil, melahirkan dan menyusui (Rachmadewi,dkk, 2000).

### **1.7 Diskriminasi Gender**

Diskriminasi merupakan tindakan, perilaku, dan sikap yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap individu/kelompok lain yang berada dalam ruang lingkup masyarakat. Diskriminasi gender merupakan diskriminasi yang terjadi berdasarkan jenis kelamin, dan diskriminasi gender dapat saja terjadi di mana-mana. Diskriminasi merupakan salah satu isu yang semakin marak terjadi di Indonesia. Tindak diskriminasi biasanya paling banyak dialami oleh kaum perempuan maupun kelompok minoritas/ kelompok transgender yang berada dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat yang membedakan faktor biologis antara laki-laki dan perempuan.

Terjadinya diskriminasi gender disebabkan oleh budaya Indonesia yang menganut patriarki yang melekat dalam tatanan masyarakat sosial. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganut pemahaman yang bersifat parsial sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam memperlakukan manusia menurut gender dan jalan hidup yang ditempuh. Kuatnya budaya patriarki memunculkan pemahaman

dalam masyarakat bahwa perempuan tidak perlu di sekolahkan atau memperoleh pendidikan yang layak, sebab perempuan nantinya akan menjadi ibu rumah tangga dan hanya akan berurusan dengan lingkungan domestik saja. Sementara laki-laki dituntut untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain diskriminasi gender, dalam masyarakat juga sering dijumpai diskriminasi orientasi seksual, yang dimana diskriminasi ini dihadapkan pada orang atau kelompok yang orientasi seksualnya berbeda dari masyarakat pada umumnya. Diskriminasi ini kerap dialami oleh individu yang perilakunya dianggap menyimpang dari kondisi normal seperti kelompok transgeder, lesbian, gay dan biseksual. Kelompok ini akan kerap diperlakukan tidak adil, sehingga akan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak hidupnya.

Keadilan dalam kehidupan bermasyarakat seharusnya dapat dinikmati oleh setiap elemen yang berada dalam masyarakat, tanpa mengenal status, peran, ras, agama, dan perbedaan jenis kelamin. Dengan demikian akan tercipta kehidupan sosial masyarakat yang rukun, dan tanpa adanya diskriminasi. Namun jika ditelusuri dalam kehidupan sehari-hari masih sering dijumpai diskriminasi dan ketidakadilan dalam lingkungan sosial.

Dipaparkan oleh (Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, 2008) yang membagi manifestasi ketidakadilan dalam empat poin yaitu, marginalisasi (peminggiran atau pemiskinan ekonomi), subordinasi (penomorduaan), stereotipe (pelabelan negatif, violence (kekerasan), hingga beban ganda. Dalam hal ini transgender termasuk kedalam manifestasi ketidakadilan tersebut, karena dianggap menyimpang oleh masyarakat. Sehingga kehadirannya/keberadaannya di tengah masyarakat menimbulkan diskriminasi.

## 1.8 Transgender

Istilah transgender pertama kali dikemukakan oleh Virginia Prince pada pertengahan tahun 1970-an dalam bukunya yang berjudul *The Transvestite and His Wife* dan *How To Be A Woman Thorough Male*. Transgender berarti orang-orang yang menjalani hidup tanpa mengikuti peran gender yang diasosiasikan dengan jenis kelaminnya dalam konteks sosial masyarakat tertentu. Kelompok transgender tidaklah melakukan operasi pergantian jenis kelamin, mereka adalah orang-orang yang senang berdandan seperti perempuan yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Konstruksi masyarakat tidak berhenti pada pendefinisian transgender dan transeksual yang dianggap menyimpang. Transgender merupakan individu yang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir. Transgender tidak mengacu pada bentuk spesifik orientasi seksual orangnya. Istilah transgender di Indonesia lebih banyak di kenal sebagai waria, beberapa daerah juga mempunyai istilah yang menggambarkan transgender seperti, wadam, (Jakarta), calabai (Sulawesi), dan wandu (Jawa) calalai (Bugis). Seorang transgender dapat saja mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, atau biseksual (Yash, 2003: 17). Secara etimologis transgender berasal dari dua kata yaitu, “trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan; perubahan; pemindahan), dan “gender” yang berarti kelamin (Pius dan Dahlan dalam Nur Fadilatul, 2013: 16).

Bastaman (2004) mengemukakan bahwa transgender merupakan wujud keinginan untuk hidup dan diterima sebagai anggota kelompok lawan jenisnya. Biasanya keinginan ini disertai oleh rasa tidak nyaman terkait jenis kelamin anatomisnya, sehingga ia terdorong untuk membedah jenis kelamin dan/atau

menjalani terapi hormonal agar struktur fisiknya sepadan dengan jenis kelamin yang diinginkan . Di jelaskan oleh Carroll (dalam Ruhgea, 2010), individu dengan gangguan identitas gender umumnya sudah mulai merasakan indikasi gangguan tersebut sejak kecil, dimana ia merasa dan meyakini bahwa dirinya adalah jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelaminnya saat ini, dan perasaan ini terus berlanjut hingga masa dewasa (Rahmania, Pengalaman Diskriminasi Dalam Kehidupan Transgender Dewasa Awal, 2017)

Judith P Butler seorang pemikir feminisme Amerika, melalui teori queernya, menyatakan bahwa tidak ada identitas gender yang asli. Identitas gender dibentuk melalui ekspresi dan pertunjukan yang berulang-ulang hingga terbentuk identitas gender seseorang. Inti dari pemikiran tersebut bahwa tidak ada kondisi alamiah bagi manusia selain dari penampakan tubuhnya. Seks, gender, maupun orientasi seksual merupakan suatu konstruksi sosial, yang dicontohkan melalui fenomena transseksual. Seseorang yang telah melakukan transseksual, diasumsikan telah mengubah kondisi alamiahnya.

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa transgender merupakan suatu bentuk perilaku baik oleh individu maupun kelompok yang menggunakan atribut gender diluar dari yang dikonstruksikan oleh masyarakat, yang dianggap menyimpang dari peran gender (laki-laki atau perempuan), nilai, norma serta agama secara umum. Namun tidak selalu ditetapkan pada saat kelahiran. Sehingga kelompok transgender sering memperoleh cap, etiket, merek/stigma negatif dari lingkungan sosial. Oleh sebab itu individu yang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer akan terdorong untuk untuk melanjutkan penyimpangan pada tahap sekunder dengan alasan “kepalang tanggung”.

Melanjutkan paparan diatas, transgender diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Transpuan atau trans perempuan adalah seseorang yang ketika lahir diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki, yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai perempuan.
2. Transpria adalah seseorang yang ketika lahir berjenis kelamin perempuan, yang kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki.
3. *Non-binary atau gender queer* adalah yang identitas gendernya berada diluar kategori laki-laki dan perempuan atau menjadi suatu kombinasi dari kategori laki-laki dan perempuan.

Selain itu kelainan seksual yang bukan karena kromosom, juga didasari oleh kelainan seksual yang berkembang sejak dalam kandungan ibu. Kelompok ini di bagi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut;

1. *Pseudomale* atau disebut juga sebagai pria tersamar. Merupakan individu yang memiliki sel wanita tetapi secara fisik ia adalah pria.
2. *Pseudofemale* disebut juga sebagai wanita tersamar, yang merupakan tubuh yang lebih dominan mengandung sel pria. Tetapi, pada pemeriksaan gonad (alat yang mengeluarkan hormon dalam embrio) alat seks yang dimiliki adalah Wanita.
3. *Female-pseudohermaprodite*, individu yang memiliki kromosom wanita (XX) tetapi pada perkembangan fisiknya cenderung sebagai pria.
4. *Male-pseudohermaprodite*, merupakan individu yang memiliki kromosom pria (XY) namun pada perkembangan fisiknya cenderung sebagai wanita.

## **1.9 Pelayanan Publik**

Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan publik. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu yang sangat penting karena dalam prosesnya pelayanan publik tidak efektif dan efisien, berjalan di tempat, berbelit-belit, terjadi diskriminasi terhadap masyarakat minoritas dan dianggap kurang mampu, serta lambat. Pelayanan publik pada umumnya merujuk pada segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah ataupun institusi publik kepada masyarakat. Hal ini mencakup berbagai jenis layanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umum.

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang telah diatur dalam undang-undang, dan yang dilaksanakan oleh swasta maupun negeri. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik pelayanan berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Pada hakikatnya pelayanan merupakan serangkaian kegiatan karena itu merupakan proses secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses tersebut adalah proses saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan antara masyarakat, pemerintah, perusahaan swasta, rumah sakit swasta dan lain sebagainya. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut seluruh aspek kehidupan yang sangat luas. Pelayanan publik mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, perpajakan, dan pengurusan data-data maupun dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan

bernegara pemerintah berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya (Mohammad, 2003).

Adapun tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu masyarakat dalam permasalahan yang dialami, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat umum. Dalam pelayanan publik dibutuhkan pengelolaan yang baik, dan perlunya koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah, pimpinan, alokasi sumber daya yang tepat sasaran, pengawasan yang tepat, pelaksanaan yang tepat sasaran, dan melibatkan masyarakat umum di dalamnya. Pelayanan publik yang berkualitas dan tepat sasaran, tidak mempersulit masyarakat, tidak berbelit-belit, dan tidak pungli, akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap instansi atau pemerintah yang berkaitan.

Berikut ini merupakan beberapa unsur penting dalam proses pelayanan publik menurut Bhrata, yaitu;

1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang menyediakan layanan kepada konsumen baik berupa pelayanan bentuk barang maupun jasa.
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang menerima layanan baik layanan barang ataupun jasa.
3. Jenis layanan, yaitu jenis layanan yang dapat diberikan oleh penyedia kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, yaitu pada saat proses pelayanan berlangsung penyedia layanan fokus pada tujuan utamanya yaitu mencapai kepuasan pelanggan.

Adapun asas-asas pelayanan publik yang dicantumkan pada UU No 25 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut;

1. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.
2. Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau (Sisma, 2022).

### **2.9.1 Layanan Kebutuhan Dasar**

Berdasarkan definisi yang terkandung dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kebutuhan dasar merupakan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam bentuk infrastruktur fisik, pendampingan psikologis, subsidi, serta skema sejenis lainnya yang memungkinkan pemenuhan ragam kebutuhan dasar dimaksud. Yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh masyarakat yang tidak mampu memenuhi keebutuhan dasar dan yang layak, dan tidak memiliki sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian (Jogloabang, 2019)

Pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap masyarakatnya dapat dikategorikan menjadi dua (2), yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar.

Pelayanan yang paling mendasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat meliputi, kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

2. Pelayanan Umum

Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terhadap masyarakat terbagi dalam tiga (3) kelompok, dijelaskan sebagai berikut;

a. Pelayanan Administratif.

Pelayanan yang berupa dalam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik seperti, KTP, KK, Akte Kelahiran, Paspor dan sebagainya.

b. Pelayanan Barang.

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang dibutuhkan oleh publik, seperti jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, dan air bersih.

c. Pelayanan Jasa

Pelayanan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan menengah dan tinggi, pemeliharaan kesehatan, penyedia jasa transportasi, jasa pos, penanggulangan bencana, serta pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial)

## **2.9.2 Ketidaksetaraan Pelayanan Publik Terhadap Kelompok Transgender**

Kelompok transgender di Indonesia setidaknya mengalami permasalahan dalam memperoleh akses pelayanan publik yang berkualitas dan tidak berbelit-belit. Diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Aspek Pemenuhan Ekonomi. Bagi kelompok transgender dalam memperoleh pekerjaan yang layak menjadi hal yang mustahil untuk didapatkan. Hal ini disebabkan oleh belum diakuinya identitas gender kelompok minoritas tersebut dalam legalitas hukum Indonesia (sulit bagi kelompok transgender dalam memperoleh kartu identitas diri seperti KTP, KK).
2. Aspek Kesehatan. Kelompok transgender kerap kali mendapatkan perlakuan tidak adil dan diskriminasi pada saat hendak berobat dan dipersulit dalam pengadministrasian. Hal ini terjadi karena pandangan pelaksana pelayanan kesehatan terhadap transgender bersifat negatif.
3. Aspek Pendidikan. Disebabkan oleh tidak adanya penerimaan sosial dari masyarakat terhadap kelompok transgender, dan tidak adanya identitas diri yang jelas (KK, akte lahir) sehingga sulit untuk memperoleh pendidikan yang mendasar. Namun seiring berjalannya waktu, sudah dapat ditemui transgender yang mampu memperoleh pendidikan bahkan ada yang sampai berhasil dan sukses dalam kehidupannya.

Selain hal tersebut diatas, kelompok transgender juga memiliki permasalahan lain, yaitu sebagai berikut:

2. Permasalahan Keluarga. Dalam konteks integrasi dan hubungan dengan keluarga, transgender seringkali dianggap sebagai aib dan mendatangkan kesialan, sehingga banyak diantara mereka mengucilkan, tidak diakui sebagai anggota keluarga, kehadirannya ditolak, bahkan sampai mengusir dan mengasingkannya. Disamping itu juga keluarga menjadi menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu.
3. Permasalahan Masyarakat. Transgender dianggap sebagai sosok yang melakukan penyimpangan dan banyak menimbulkan masalah dilingkungan masyarakat. Terutama dari segi permasalahan seksual yang dapat mempercepat penyebaran IMS (Infeksi Menular Seksual) dan HIV/AIDS.

### **1.10 Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori melalui berbagai hasil penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat perlu dan penting untuk dijadikan sebagai data pendukung penelitian. Kajian terhadap penelitian terdahulu dapat digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan, maupun sebagai bahan analisis penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang sedang di kaji oleh peneliti.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chintia C Tarigan (2017)	Kehidupan Waria di Kota Medan	Kualitatif Desain Naratif	Untuk mengetahui bagaimana gambaran kehidupan waria di kota Medan	Belum semua masyarakat yang ada di kota Medan dapat menerima keberadaan waria disekitar mereka, meskipun ada hanya sebagian kecil elemen dari masyarakat yang terima akan fenomena waria tersebut. Hal ini dikarenakan oleh adanya pandangan negatif masyarakat terhadap waria yang banyak bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial.
2.	Miranti Rahmania (2017)	Pengalaman Diskriminasi dalam Kehidupan Transgender Dewasa Awal	Kualitatif Fenomenologi	Untuk mengetahui pengalaman diskriminasi dalam kehidupan transgender dewasa awal	Dalam masa dewasa awal kelompok transgender kerap sekali mendapatkan kekerasan secara verbal dan nonverbal, stigma diskriminasi serta pembebrn informasi pribadi dari keluarga sendiri dan dari orang-orang disekitarnya. Selain itu kelompok transgender kerap sekali di di diskriminasi dalam bidang sosial, hukum, politik, dan kebudayaan.
3.	Rendi Pratama Sugiarto (2017)	Upaya Waria Untuk Mendapatkan Penerimaan Sosial dari Masyarakat	Kualitatif studi kasus	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya waria mendapatkan penerimaa	Upaya yang dilakukan oleh waria dalam mendapatkan penerimaan sosial dari masyarakat RT 04, Krajan Barat, Kelurahan Sumpersari, antara

No	Nama Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
				n sosial dari masyarakat agar tidak ada jarak diantara keduanya	lain; dengan bersikap ramah terhadap masyarakat, memberikan diskon harga terhadap konsumen yang datang ke salonnya, ikut serta dalam membayar iuran kemasyarakatan seperti iuran kebersihan lingkungan, serta bekerja pada waktu yang normal (tidak membuka usaha salon sampai larut malam). Namun tentunya dalam setiap usaha pastinya akan selalu ada hambatan yang dialami oleh waria baik dari dalam maupun dari luar.

(Sumber: Penulis, 2023)

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (Skripsi Chintia C Tarigan), yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan desain naratif, dan menjelaskan secara deskriptif tentang fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Perbedaannya, yaitu Skripsi Chintia C Tarigan menemukan bahwa Kehidupan Waria di Kota Medan kerap sekali mendapatkan tekanan sosial baik dari keluarga sendiri dan dari masyarakat, dalam penelitian tersebut peneliti hanya berfokus pada kehidupan dan kegiatan yang dilakukan oleh waria saja. Sedangkan

penulis dalam hal ini tidak hanya berfokus pada kehidupan sehari-hari transgender tetapi juga melihat bagaimana kelompok transgender mendapatkan akses layanan kesehatan yang ramah, dan tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (Skripsi Miranti Rahmania) sama -sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dan menjelaskan secara deskriptif tentang fenomena dan fakta yang ditemui di lapangan. Perbedaannya, Skripsi Miranti Rahmania hanya berfokus pada diskriminasi yang dialami oleh transgender saja. Sedangkan penulis dalam hal ini berfokus pada diskriminasi pelayanan publik di bidang kesehatan kepada kelompok transgender.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (Skripsi Rendi Pratama Sugiarto) sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus, dan menjelaskan secara rinci dan deskriptif tentang fenomena dan fakta yang ditemui di lapangan. Perbedaannya Skripsi Rendi Pratama Sugiarto berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang waria dalam mendapatkan penerimaan sosial dari masyarakat RT 04 Lingkungan Krajan Barat, Kelurahan Sumbersari. Sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada bentuk pelayanan publik yang tidak diskriminatif terhadap kelompok transgender.

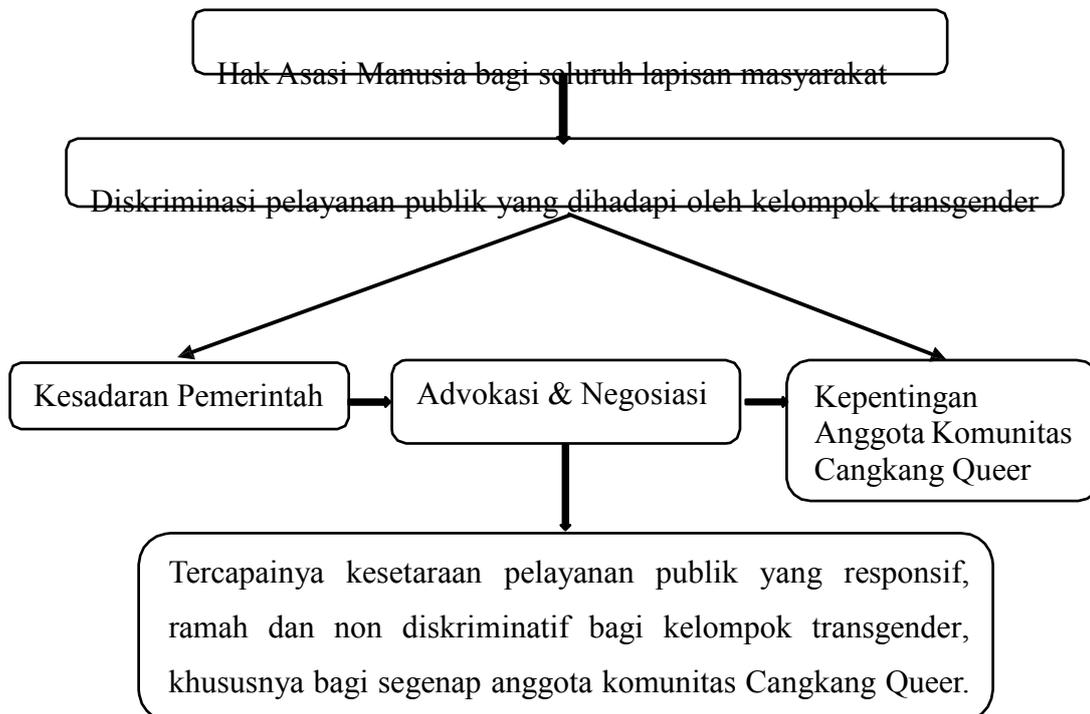
Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai kelompok transgender sehingga dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut juga dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan kelompok transgender, ekonomi sosial transgender, dan bentuk pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan untuk kelompok transgender.

### 1.11 Kerangka Alur Berpikir

Kerangka berpikir merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka berpikir mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan atau menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

#### Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka alur berpikir di atas, desain penelitian ini didasari oleh adanya fenomena ketidaksetaraan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat, yaitu kepada kelompok transgender. Pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat umum. Terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas akan semakin baik ketika pemerintah dan objek yang dilayani menjalankan dan menaati aturan yang sudah ada. Kelompok minoritas/ transgender adalah kelompok yang sering memperoleh pelayanan yang buruk terutama di bidang kesehatan, oleh karena itu pentingnya campur tangan pemerintah yang responsif, ramah dan tidak pandang bulu dalam melayani masyarakat dan juga kelompok transgender supaya tercipta pelayanan publik yang berkualitas dan tidak diskriminatif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Lincoln & Guba 1990:18 dalam (Pujosuwarno, 1986) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dapat juga disebut dengan *case study* ataupun *kualitatif*, yaitu penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya Moh.Surya & Djumhur dalam (Pujosuwarno, 1986) menyatakan bahwa studi kasus dapat diartikan sebagai suatu teknik dalam mempelajari individu secara mendalam dan untuk membantu individu tersebut memahami diri dan memperoleh penyesuaian diri dengan lingkungan, serta memberikan solusi terhadap seorang individu yang sedang diteliti.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu komunitas transgender yang ada di kota Medan, yaitu komunitas *Cangkang Queer* yang berdomisili di provinsi Sumatera Utara. Sedangkan waktu dalam penelitian dimulai pada bulan Februari sampai bulan September.

Berikut ini merupakan jadwal penelitian;

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan (2023)																																	
		Januari		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																																
2	Acc Judul			■	■																														
4	Bahan Literatur					■	■	■	■																										
3	Persetujuan Pembimbing									■	■																								
5	Penyusunan Proposal									■	■	■	■	■																					
6	Bimbingan Proposal														■	■	■	■																	
7	Acc Proposal																					■	■												
8	Seminar Proposal																						■	■											
9	Revisi Proposal																						■	■	■	■									
10	Pengumpulan Data ( Penelitian)																																		
11	Bimbingan Skripsi																																		
12	Periksa Buku																																		
13	Pengadaan & Tanda Tangan																																		
14	Mejah Hijau																																		

### 3.3 Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian merupakan orang yang memahami dan mengetahui informasi mengenai objek penelitian dan yang memberikan informasi kepada peneliti dan memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Oleh sebab itu informan yang dipilih merupakan orang yang lebih banyak mengetahui topik penelitian, menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat. Dalam mewawancarai informan peneliti tidak boleh memaksakan kehendaknya. Penelitian kualitatif menuntut penggalian informasi yang mendalam terhadap fenomena atau objek yang sedang diteliti, oleh karena itu informan dalam penelitian harus dibatasi.

Informan dalam penelitian ini adalah transgender yang berada di komunitas *Cangkang Queer* dan yang berdomisili di provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu informan dalam penelitian ini meliputi;

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena itu informan kunci dalam penelitian ini adalah Amek Adlian yang merupakan pemimpin atau ketua komunitas *Cangkang Queer*.
2. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti, yaitu anggota komunitas *Cangkang Queer* yang aktif dalam komunitas, antara lain Lala, Rere, Joe, dan Pily.

#### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang sistematis dalam pengumpulan data yang nyata, penyusunan, dan penyajian fakta yang digunakan untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Data Primer merupakan data mentah yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dan belum diolah maupun dimanipulasi sebelumnya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan;
  - a. Tipe wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap informan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan. Dengan tipe wawancara ini akan membantu peneliti secara leluasa dalam menggali informasi dan data selengkap

mungkin, sehingga dapat mengetahui kehidupan sehari-hari kelompok transgender yang ada di kota Medan.

2. Data Sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data atau bahan yang sudah ada sebelumnya yang kemudian digunakan kembali untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut;
  - a. Dokumentasi. Merupakan suatu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, serta penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.

Peneliti dalam hal ini juga menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, sebab peneliti akan memperoleh informasi atau data dari informan yang berbeda-beda. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber. Nilai dari pengumpulan data dari teknik triangulasi akan memastikan bahwa data yang diperoleh tidak meluas dan konsisten. Dengan melakukan triangulasi dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran data penelitian, sehingga mengiring pula pada keakuratan hasil penelitian. Cara ini pun sekaligus dapat mencegah subjektifitas dalam penelitian.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data melibatkan pengumpulan data terbuka yang berdasar pada pertanyaan-pertanyaan umum serta analisis informasi dari narasumber. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal apa saja yang penting untuk dikelola, dan membuat kesimpulan.

Adapun tahapan pengolahan dan analisis data menurut Miles & Huberman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Tahap Reduksi Data, merupakan tahap dimana peneliti memilah data, mengkategorikan, memfokuskan sesuai bidangnya, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.
2. Tahap Penyajian Data (Display Data), merupakan analisis yang dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam uraian kalimat, hubungan antara kategori yang sudah berurutan, dan sistematis.
3. Tahap Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini peneliti akan mengevaluasi data pada tahap reduksi sesuai dengan bukti yang ditemukan selama di lapangan. Hal ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan.